

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangguran terdidik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, gender, status perkawinan, sedangkan kedudukan dalam rumah tangga dan wilayah tempat tinggal tidak mempengaruhi pengangguran terdidik. Tenaga kerja terdidik memiliki peluang besar menjadi pengangguran apabila hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, dan berjenis kelamin perempuan serta belum menikah. Selanjutnya juga ditemukan bahwa interaksi variabel wilayah tempat tinggal dengan variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, umur, gender, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga mempengaruhi probabilitas pengangguran terdidik. Artinya tenaga kerja terdidik yang tinggal di perdesaan dan hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, berumur muda, dan berjenis kelamin perempuan, belum menikah dan berkedudukan sebagai kepala rumah tangga memiliki peluang lebih menjadi pengangguran. Kemudian juga diketahui bahwa angkatan kerja terdidik yang berada di pulau Jawa memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia angkatan kerja terdidik yang berada di pulau Maluku memiliki peluang lebih besar bekerja dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Durasi menganggur dari pengangguran terdidik di Indonesia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, status perkawinan, wilayah tempat tinggal sedangkan gender dan kedudukan dalam rumah tangga tidak mempengaruhi durasi menganggur. Pengangguran terdidik akan menganggur lebih lama apabila hanya tamat SMA/ sederajat, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, tidak memiliki pengalaman kerja, berumur muda, belum menikah, dan tinggal di perdesaan. Kemudian juga diketahui bahwa tenaga kerja terdidik yang berada di pulau Jawa memiliki peluang lebih besar menganggur lebih lama dibandingkan

dengan wilayah lainnya di Indonesia dan yang berada di pulau Maluku memiliki peluang lebih besar menganggur lebih singkat dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Pada tingkat pulau, diketahui bahwa tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja dan status perkawinan merupakan variabel yang menentukan seorang angkatan kerja terdidik menjadi pengangguran namun di wilayah Papua terjadi pengaruh yang berlawanan tingkat pendidikan terhadap pengangguran, dimana tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Seranjutnya diketahui bahwa variabel wilayah tempat tinggal bukanlah variabel yang mempengaruhi pengangguran terdidik pada wilayah pulau di Indonesia kecuali pada wilayah Papua.

Pada tingkat provinsi diketahui bahwa bahwa variabel tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur dan status perkawinan secara umum mempengaruhi pengangguran terdidik. Namun untuk provinsi Papua Barat ditemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap pengangguran terdidik, hal ini membuktikan bahwa angkatan kerja tamatan perguruan tinggi memiliki peluang lebih besar menganggur dibandingkan dengan tamatan SMA/ sederajat. Begitu juga dengan provinsi Papua juga ditemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik, artinya probabilitas pengangguran terdidik di provinsi Papua tidak ditentukan oleh tingkat pendidikan angkatan kerja.

## **B. Implikasi Penelitian**

Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini masih belum bisa dipisahkan dari pengangguran maka dalam rangka mngurangi tingkat pengangguran terdidik serta memperpendek durasi menganggurnya maka perlu disampaikan berbagai kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait tentang tingkat pendidikan, pelatihan kerja, pengalaman kerja, umur, jenis kelamin, status perkawinan, kedudukan dalam rumah tangga, dan wilayah tempat tinggal.

## 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal merupakan penopang dasar bagi seseorang dalam meningkatkan taraf hidupnya, semakin tinggi tingkat pendidikan. Angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan mempermudah dia mendapatkan pekerjaan sehingga akan memperpendek durasi menganggurnya. Untuk itu, pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan kualitas lulusan mulai dari tingkat SMA/ sederajat sampai tamat perguruan tinggi. Pada tingkat SMA/ sederajat perlu diperbanyak sekolah kejuruan di berbagai daerah dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja terampil yang dapat diterima oleh dunia kerja. Pada tingkat perguruan tinggi maka perlu dilakukan *link and math* kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja agar semua tamatan perguruan tinggi siap bersaing dalam memasuki pasar kerja. Selanjutnya program wajib belajar 12 tahun harus menjadi hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya dalam pengembangan pendidikan vokasi di wilayah Barat atau Timur Indonesia.

Pihak pemerintah dan perguruan tinggi mengundang pihak swasta untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk perguruan tinggi, sehingga saling keterkaitan dan proporsionalitas (*Link and Match*) antara pendidikan dan tempat kerja bisa terjadi. Adanya *Link and Match* membuat perguruan tinggi juga bisa menentukan kompetensi apa yang paling dibutuhkan tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, Perguruan tinggi juga mampu memprediksi dan mengantispasi keterampilan apa yang dibutuhkan tenaga kerja dan teknologi di masa yang akan datang, dan yang lebih penting perguruan tinggi harus menjalin hubungan dan menjalin hubungan dengan berbagai perusahaan yang bersedia menjadi ajang belajar kerja (*magang*) bagi mahasiswa yang akan lulus. Dengan *magang* langsung ke tempat kerja, lulusannya tidak hanya siap dalam teori tetapi juga dalam praktek kerja.

Perguruan tinggi perlu memperbanyak dan menyebarkan program studi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, perlu juga dikembangkan pusat studi ketenagakerjaan di masing masing perguruan tinggi yang fungsinya menjadi penghubung antara dunia usaha dan dunia pendidikan dalam menyalurkan

lulusannya. Dengan adanya pusat studi ketenagakerjaan ini maka perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi kegiatan rekrutan karyawan, bursa kerja dan lain sebagainya.

Selanjutnya, sangat perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berbasis peran serta masyarakat karena terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mendanai pembangunan kualitas sumber daya manusia, juga karena hakikat pendidikan adalah emansipatoris yang bermakna partisipatoris dalam gerakan memberdayakan manusia. Hal ini pun sejalan dengan paradigma pembangunan pendidikan yang diletakkan pemerintah, yakni pembangunan pendidikan yang bersoko pada keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Meningkatkan hubungan antara lembaga pendidikan dan industri sehingga relevansi pendidikan dapat ditingkatkan. Komitmen pemerintah daerah untuk menjadi pusat perkembangan sekolah kejuruan terus didorong dengan peningkatan penguasaan kecakapan hidup (*life skills*) di kalangan siswa, sehingga mereka bisa dan siap untuk menjadi *entrepreneur*.

Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah menjadi keniscayaan dalam rangka menekan tingkat pengangguran. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memajukan dunia pendidikan perlu terus ditingkatkan, karena secara fundamental pendidikan dilakukan bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran.

## 2. Pelatihan Kerja

Masalah pengangguran penting didekati dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia karena terkait fakta bahwa pengangguran terjadi bukan semata-mata terbatasnya lapangan pekerjaan tetapi juga akibat tidak relevannya pendidikan yang ditamatkan dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan tuntutan lapangan kerja sehingga sangat diperlukan program pelatihan kerja. Implikasi kebijakan terkait dengan pelatihan kerja yaitu perlu diperbanyak balai latihan kerja di setiap daerah di Indonesia untuk memberikan memberikan *training*, *upgrading*, maupun *conselling* sehingga angkatan kerja terdidik akan lebih siap memasuki pasar kerja.

Selanjutnya perlu diperbanyak pasar kerja yang lebih informatif yang dapat mempertemukan pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. selanjutnya pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota sangat perlu melakukan berbagai pelatihan/kurus berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan, didahului oleh *training needs assessment* dengan mensinergikan program yang dirancang dinas pendidikan, organisasi profesi, kalangan industri, dan stakeholders lainnya.

Memberdayakan sanggar-sanggar kegiatan belajar yang dikelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan memperluas cakupan program bukan hanya baca, tulis, dan hitung (*calistung*) dengan berbagai keterampilan ekonomi produktif demi menekan tingkat pengangguran. Serta meningkatkan kualitas pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millenial (*pendidikan vokasi dan soft skills*).

Pemerintah harus mampu menyediakan tenaga kerja terdidik untuk dimiliki keterampilan, dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK), Melakukan pelatihan dengan melaksanakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Nasional Kompetensi Indonesia (SKNI) sebagai instrumen dasar berbasis kompetensi pelatihan, pengakuan akselerasi sertifikat kompetensi kerja dan memastikan peningkatan akses dan kualitas sertifikasi profesi di setiap sektor, termasuk memperbanyak dan meningkatkan kualitas Sertifikasi Profesi Agency (LSP), dan mengundang investasi dalam dan luar negeri di bidang pelatihan kejuruan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah prioritas dan pasar tenaga kerja

### 3. Pengalaman Kerja

Temuan penelitian ini menemukan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap pengangguran terdidik dan durasi menganggur. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja terdidik yang tidak memiliki pengalaman kerja akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan yang belum memiliki pengalaman kerja. Implikasi kebijakan terkait dengan pengalaman kerja yaitu, lembaga pendidikan (SMA, SMK,



Perguruan Tinggi) harus memperbanyak kegiatan magang bagi peserta didiknya pada berbagai instansi maupun perusahaan dalam rangka memberikan pengalaman kerja terhadap peserta didik.

Pemerintah perlu memberikan bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berupa bimbingan teknis dan manajemen memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluasan pasar. Serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan peningkatan pola kemitraan UKM dengan BUMN, BUMD, BUMS dan pihak lainnya.

#### 4. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan seorang angkatan kerja untuk sukses di pasar kerja, dimana seseorang yang sudah berumur tua cenderung kurang produktif sehingga banyak perusahaan lebih memilih tenaga kerja muda dibandingkan dengan yang sudah tua. Implikasi kebijakan terkait dengan umur ini yaitu perlu adanya regulasi dari pemerintah untuk mengatur tentang umur angkatan kerja yang diterima oleh perusahaan. Khususnya dalam melakukan rekrutmen karyawan, perusahaan sebaiknya tidak lagi membatasi umur maksimal yang diterima tapi sebaiknya diberi kesempatan kepada semua umur sehingga semua angkatan kerja baik muda maupun tua memiliki peluang yang sama untuk diterima.

#### 5. Gender

Jenis kelamin atau gender juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab seorang angkatan kerja untuk dapat diterima di pasar kerja. Tenaga kerja perempuan memiliki kecenderungan untuk menjadi pengangguran terdidik dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki. Implikasi kebijakan terkait dengan gender ini yaitu perusahaan tidak boleh melakukan dekriminasi gender dalam

melakukan rekrutmen karyawan sehingga baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama mendapatkan suatu pekerjaan.

## 6. Status Perkawinan

Status perkawinan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab seorang angkatan kerja menganggur atau tidak. Angkatan kerja yang belum menikah cenderung menganggur dibandingkan dengan yang sudah menikah. Implikasi kebijakan terkait dengan status perkawinan ini yakni pemerintah perlu melakukan pengaturan terhadap perusahaan-perusahaan dalam mengelola karyawannya berkaitan dengan status perkawinan, dimana perusahaan tidak boleh hanya memberikan kesempatan kepada angkatan kerja yang belum menikah saja untuk dapat diterima bekerja.

## 7. Kedudukan Dalam Rumah Tangga

Kedudukan dalam rumah tangga merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu seseorang menganggur atau tidak, dimana ketika seorang angkatan kerja memiliki kedudukan sebagai kepala rumah tangga maka peluangnya untuk menganggur akan semakin kecil. Implikasi kebijakan terkait dengan kedudukan dalam rumah tangga adalah menyarankan kepada tenaga kerja laki-laki yang sudah bekerja untuk segera menikah dan berumah tangga.

## 8. Wilayah Tempat Tinggal

Implikasi kebijakan terkait dengan wilayah tempat tinggal yaitu pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah harus melakukan penyebaran pembangunan sampai tingkat perdesaan agar dapat mendorong kemajuan perekonomian pada wilayah perdesaan yang pada gilirannya dapat menyerap tenaga kerja. selanjutnya, pemerintah provinsi perlu mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah (perdesaan) serta potensi “demand” tenaga kerja.

Pemerintah pusat maupun provinsi perlu sesegera mungkin melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpinggirkan sebagai prioritas dengan membangun fasilitas

transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur diberbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia.

### C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, namun dengan adanya keterbatasan ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk penelitian yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini mengkaji penyebab pengangguran dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik dari sisi penawaran tenaga kerja. Kepada peneliti berikutnya diharapkan melakukan kajian tentang penyebab pengangguran dan durasi menganggur tenaga kerja terdidik dari sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja
2. Data penelitian berupa raw data hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus 2017, diharapkan peneliti berikutnya menggunakan data yang periode waktunya lebih panjang.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk dianalisis, kepada peneliti berikutnya diharapkan untuk menggunakan data primer dan sekunder supaya mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif
4. Sampel penelitian ini adalah seluruh angkatan kerja terdidik pada nasional, wilayah pulau dan tingkat provinsi yang disurvei oleh Sakernas, kepada peneliti berikutnya diharapkan menganalisis data sampai pada tingkat Kabupaten/Kota

